BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang – Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah pula memberikan kewenangan otonomi bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai kebutuhan serta sumberdaya yang dimiliki demi kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan Undang – Undang tersebut, maka provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonomi telah membenahi diri untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diantaranya adalah sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013 bahwa pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2012, tercatat total produksi sebesar 2.495.536, 3 ton sedangkan pada tahun 2011 produksi perikanan sebesar 2.036.458,3 ton dimana mengalami peningkatan sebesar 459.078 ton atau sebesar 22 %. Namun seiring dengan peningkatan produksi perikanan tersebut, menurut Survey PPTK Unhas terjadi penurunan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan berupa kerusakan terumbu karang

yang diakibatkan oleh kegiatan penangkapan ikan dengan pemboman dan penggunaan potassium sianida.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan, maka pada Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan kegiatan yang meliputi (1). Perikanan Budidaya, (2) Perikanan Tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) Kelembagaan dan Usaha Perikanan dan (4) Pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pada bidang pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

   Peningkatan operasional dan pemeliharaan speed boat kapal pengawas dilaksanakan dengan maksud melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal- kapal ikan yang berada di sekitar perairan Sulawesi Selatan, dan pemeliharaan sarana pengawasan berupa speed boat dalam rangka mendukung tersedianya sarana pengawasan sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat terlaksana dengan baik dan normal.

2. Pemantauan dan Analisis Data Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

   Kegiatan pematauan ini dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya, objek pemantauannya meliputi : ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, sumberdaya ikan

dan lingkungannya, kawasan konservasi dan pemantauan terhadap sumber-sumber pencemaran.

3. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan

   Pertemuan ini dilaksanakan sebagai wadah untuk melaksanakan koordinasi dalam penanganan tindak pidana perikanan, penyamaan persepsi dan keterpaduan gerak dan langkah dalam melaksanakan penegakan hukum bidang perikanan di Sulawesi Selatan.

4. Temu Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan

   Kegiatan Temu Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas perikanan.

5. Pengawasan Desa Berbasis SDK

   Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan potensi kelautan dan perikanan yang ada di wilayah perairan desa dan perencanaan pengembangan desa berbasis pengawasan, serta menciptakan perencanaan yang baik tentang desa yang awalnya berperilaku detruktif berubah menjadi ramah lingkungan..

6. Identifikasi dan Verifikasi Usaha Perikanan Ijin Daerah

   Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui jumlah izin penangkapan, budidaya dan pengolahan yang berdasarkan izin dan kewenangan yang dikeluarkan oleh provinsi/kabupaten/kota.

7. Pembinaan Pengawas Perikanan

   Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengawas sehingga menjadi pengawas yang handal dan professional dalam melakukan pengawasan.

8. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas

   Maksud dilaksanakannya kegiatan pembinaan ini untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

9. Evaluasi Kelompok Masyarakat Pengawas

   Tujuan Dilaksanakannya evaluasi kelompok Masyarakat Pengawas adalah untuk mendapatkan kelompok masyarakat pengawas terbaik di tingkat provinsi untuk di ajukan dalam penilaian tingkat nasional.

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut diatas diupayakan pelaksanaanya seoptimal mungkin untuk mengurangi penurunan stok sumberdaya perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mencermati hal tersebut di atas, maka ditentukan judul penelitian yaitu “Kinerja Bidang Pengawasan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan”.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Bidang Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan :

- Untuk mengetahui kinerja bidang pengawasan pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi dunia akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan kinerja pegawai dan sebagai bahan ,referensi bagi yang berkeinginan penelitian lanjutan pada bidang yang sama

b. Manfaat bagi dunia praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengambil keputusan untuk dapat melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.